

# KAUSALITAS DAN KOINTEGRASI ANTARA PENGELUARAN PEMERINTAH DAN PERTUMBUHAN EKONOMI KURUN WAKTU 1983 -2104

<sup>1</sup>Roza Linda

Rozza\_Linda@Yahoo.com

## ABSTRACT

*Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kausalitas (hubungan timbal balik) dan kointegrasi (hubungan jangka panjang) antara pengeluaran pemerintah dan pertumbuhan ekonomi kurun waktu 1983 – 2014 di Provinsi Riau. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Cointegrasi test dan Granger Causality test dengan menggunakan software Eviews 9. Uji kointegrasi dilakukan dengan menggunakan metode Johansen's Cointegration Test. Hasil Uji Johansen's Cointegration Test diperoleh nilai trace statistic atupun max-eigen lebih besar dari critical value pada tingkat keyakinan  $\alpha = 1\%$ . Dari hasil uji kointegrasi mengindikasikan bahwa diantara perubahan pengeluaran pemerintah dan pertumbuhan ekonomi memiliki hubungan stabilitas/keseimbangan dan kesamaan pergerakan dalam jangka panjang.*

*Hasil uji kausalitas granger diperoleh hasil bahwa pertumbuhan ekonomi mempengaruhi pengeluaran langsung pemerintah yang ditunjukkan oleh nilai probabilitas sebesar 0,0054 lebih kecil dari 1% begitu juga dengan pengeluaran tidak langsung pemerintah dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi yang ditunjukkan oleh nilai probabilitas sebesar 0,0002 lebih kecil dari 1%. Dari hasil diatas maka untuk Provinsi Riau tidak berlaku hubungan timbal balik antara pengeluaran pemerintah dan pertumbuhan ekonomi tetapi hanya terjadi hubungan searah yaitu pertumbuhan ekonomi mempengaruhi pengeluaran pemerintah baik pengeluaran langsung maupun tidak langsung.*

**Kata-kata Kunci** : Kausalitas Granger, Uji Johansen's Cointegration Test.

## PENDAHULUAN

Dalam suatu perekonomian modern, pemerintah memiliki peranan yang penting dalam mengatur suatu kegiatan ekonomi. Disamping mengatur dan mengawasi kegiatan ekonomi pemerintah juga melakukan sendiri beberapa kegiatan ekonomi. Biasanya kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah adalah kegiatan yang kurang menguntungkan kepada pihak swasta. Kegiatan-kegiatan tersebut adalah kegiatan mengembangkan prasarana ekonomi seperti jalan, jembatan, rumah sakit, sekolah, tempat ibadah dan lain sebagainya.

Tujuan campur tangan pemerintah menurut Sadono Sukirno (2015:44) yaitu untuk menjamin agar kesamaan hak setiap individu, menjaga agar perekonomian dapat tumbuh dan mengalami perkembangan yang teratur serta stabil, mengawasi kegiatan – kegiatan perusahaan, menyediakan barang publik dan mengawasi terjadinya eksternalitas kegiatan ekonomi yang merugikan masyarakat. Dalam melaksanakan kegiatan yang merupakan campur tangan Pemerintah, tentunya membutuhkan dana yang cukup besar. Pengeluaran tersebut tidak hanya untuk menjalankan roda pemerintahan saja akan tetapi juga untuk membiayai kegiatan perekonomian yang berguna untuk menggerakkan dan merangsang kegiatan ekonomi.

Keberhasilan suatu negara dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya dapat diukur melalui tingkat pertumbuhan ekonomi yang telah berhasil dicapai. Tinggi rendah laju pertumbuhan ekonomi suatu negara menunjukkan tingkat perubahan kesejahteraan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan stabil dari tahun ke tahun dapat diartikan kesejahteraan ekonomi meningkat, sementara perekonomian yang menurun atau pertumbuhan ekonomi dengan nilai negatif berarti turunnya kesejahteraan ekonomi. Disisi lain tingkat pertumbuhan ekonomi juga digunakan untuk

mengevaluasi tepat atau tidaknya kebijakan yang telah diambil sehubungan dengan peran pemerintah dalam perekonomian. Kegagalan pasar mendorong pemerintah untuk lebih jauh masuk dalam pasar dan melakukan intervensi. Pemerintah bertanggung jawab untuk menciptakan efisiensi ekonomi dan menjamin keadilan dalam berusaha. Dalam mewujudkannya pemerintah memerlukan dana yang cukup besar untuk membiayai kegiatan tersebut.

Pengeluaran yang dilakukan pemerintah menunjukkan perannya dalam perekonomian untuk mencapai kondisi masyarakat yang sejahtera. Pada dasarnya setiap pengeluaran pemerintah dilakukan atas landasan prinsip optimalisasi pemanfaatan dana untuk mencapai sasaran-sasaran yang ditetapkan. Pengeluaran pemerintah harus mampu mencapai beberapa sasaran, seperti peningkatan produktivitas kerja aparatur pemerintah, perluasan jangkauan dan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pembangunan serta terpeliharanya berbagai aset negara dan hasil-hasil pembangunan. Selain itu pengeluaran pemerintah juga mencerminkan kebijakan pemerintah, misalnya pemerintah telah menetapkan suatu kebijakan untuk membeli barang dan jasa. Pengeluaran yang dilakukan pemerintah setiap tahunnya dialokasikan ke berbagai sektor atau bidang dengan tujuan untuk mensejahterakan rakyat melalui bermacam – macam program.

Provinsi Riau merupakan yang terus melakukan dan meningkatkan kegiatan perekonomian daerah dengan tujuan untuk mencapai masyarakat adil dan sejahtera. Dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang tinggi sesuai dengan tujuan desentralisasi fiskal daerah, maka diperlukan adanya pengeluaran yang dapat mendorong kesejahteraan yang telah ditetapkan di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Alokasi pengeluaran tersebut tertuang dalam rincian pengeluaran APBD meliputi pengeluaran

tidak langsung dan juga pengeluaran langsung. Pengeluaran tidak langsung/rutin diarahkan untuk mendukung kelancaran roda pemerintahan secara optimal dan memperbesar tabungan pemerintah untuk meningkatkan kemampuan pembiayaan

nasional. Pengeluaran langsung/pembangunan diarahkan kepada pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan dan ketersediaan pelayanan umum untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Tabel 1.1.

Perkembangan Pengeluaran Pemerintah dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku (Dalam Milyar)

Tahun	PDRB ADH Berlaku	Pengeluaran Pemerintah
2010	345.773,81	3.791,40
2011	413.706,12	4.265,12
2012	469.073,02	6.670,76
2013	522.241,42	7.525,28
2014	679.692,17	8.848,30

Sumber: BPS Provinsi Riau

Berdasarkan tabel di atas, seiring dengan perkembangan pengeluaran pemerintah yang meningkat dari tahun ke tahun, maka perkembangan PDRB atas harga berlaku juga mengalami peningkatan. Artinya jika pengeluaran pemerintah meningkat maka PDRB atas harga berlaku juga mengalami peningkatan dan sebaliknya. Hal ini memungkinkan adanya hubungan kausal (timbal balik) antara pengeluaran pemerintah dan PDRB di Provinsi Riau.

Produk Domestik Bruto (PDB) yang dalam lingkup provinsi disebut Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi di suatu negara. Keterkaitan antara pertumbuhan ekonomi dan pengeluaran pemerintah yang dilakukan mempengaruhi berbagai sektor dalam perekonomian. Adanya pengeluaran pemerintah secara langsung atau tidak langsung berpengaruh terhadap sektor produksi barang dan jasa. Pengeluaran pemerintah untuk pengadaan barang dan jasa akan berpengaruh secara langsung terhadap produksi barang dan jasa yang dibutuhkan pemerintah. Pengeluaran pemerintah untuk sektor pendidikan akan berpengaruh secara tidak langsung terhadap perekonomian, karena pendidikan akan menghasilkan SDM yang lebih berkualitas dan pada akhirnya akan meningkatkan produksi.

Keterkaitan antara pengeluaran pemerintah dan pertumbuhan ekonomi telah menjadi perhatian dari banyak peneliti sebelumnya dan menghasilkan dua pendapat mengenai hubungan antara kedua variabel. Keynes dan para pendukungnya menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah mempengaruhi pertumbuhan ekonomi sesuai dengan persamaan identitas perekonomian terbuka. Sementara Hukum Wagner (*Wagner's Law*) menyatakan bahwa peningkatan perekonomian yang terjadi mempengaruhi pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah. Berbagai penelitian mengenai hubungan antara pengeluaran pemerintah dan pertumbuhan ekonomi menghasilkan simpulan beragam yang menciptakan pendukung untuk masing-masing teori.

#### Perumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan di atas maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah terdapat kointegrasi (hubungan jangka panjang) antara pertumbuhan ekonomi dan pengeluaran pemerintah di Provinsi Riau Periode 1983 – 2014.
2. Apakah terdapat kausalitas antara pertumbuhan ekonomi dan pengeluaran pemerintah di Provinsi Riau Periode 1983 – 2014.

### Signifikansi Penelitian

Hasil analisis dari penelitian ini akan bermanfaat bagi Pemerintah Provinsi Riau dan secara praktis menjadi bahan evaluasi dan masukan dalam perumusan kebijakan bagi lembaga yang berkaitan dengan perencanaan dan keuangan pemerintah.

### KAJIAN TEORITIS

#### Peranan Pemerintah Dalam Perekonomian

Menurut Mangkoesobroto dalam Sri Endang Rahayu di negara manapun selalu ada campur tangan atau intervensi pemerintah dalam perekonomian. Dalam perekonomian modern, peranan pemerintah dapat diklasifikasikan dalam tiga golongan besar, yaitu : (Mangkoesobroto dalam Sri Endang Rahayu, 2011: 128):

1. Peranan alokasi Sumber daya yang dimiliki pada dasarnya dapat digunakan untuk menghasilkan barang swasta (*private goods*) dan barang publik (*public goods*). Barang swasta (*private goods*) adalah barang yang ketersediaannya dapat dipenuhi oleh sistem pasar yaitu melalui transaksi antara penjual dan pembeli. Namun tidak semua kebutuhan masyarakat akan barang dan jasa dapat disediakan oleh sektor swasta. Barang dan jasa yang tidak dapat disediakan oleh sistem pasar ini dinamakan barang publik (*public goods*) sehingga perlu dialokasikan oleh negara.
2. Peranan distribusi  
Melalui kebijakan fiskal, pemerintah dapat mengubah posisi distribusi pendapatan. Salah satu caranya adalah dengan menerapkan sistem pajak progresif yaitu beban pajak yang lebih besar dikenakan bagi orang kaya dan relatif lebih ringan bagi orang miskin, yang disertai dengan subsidi kepada kelompok miskin. Melalui subsidi, pemerintah secara tidak langsung bisa mempengaruhi distribusi pendapatan melalui kebijakan anggaran misalnya dengan memberikan kredit perumahan

mudah untuk golongan berpendapatan rendah, subsidi pupuk untuk petani.

#### 3. Peranan stabilitas.

Selain peran alokasi dan distribusi, pemerintah mempunyai peran utama sebagai stabilator perekonomian. Hal ini dilakukan melalui berbagai regulasi. Pemerintah yang berupaya menjaga terpeliharanya tingkat kesempatan kerja yang tinggi, tingkat harga yang relatif stabil dan tingkat pertumbuhan ekonomi yang cukup memadai.

#### Teori Dasar Pengeluaran Pemerintah

Teori Makro mengenai perkembangan pemerintah dikemukakan oleh para ahli ekonomi dan dapat digolongkan ke dalam tiga golongan yaitu (Guritno Mangkoesobroto, 2008, 169):

1. Model pembangunan tentang perkembangan pengeluaran pemerintah  
Model ini dikembangkan oleh Rostow dan Musgrave yang menghubungkan pengeluaran pemerintah dengan tahap – tahap pembangunan ekonomi yang dibedakan tahap awal, tahap menengah, tahap lanjut. Teori perkembangan peranan pemerintah yang dikemukakan Musgrave dan Rostow adalah suatu pandangan yang ditimbulkan dari pengamatan berdasarkan pembangunan ekonomi yang dialami oleh banyak negara, tetapi tidak didasarkan oleh suatu teori tertentu.
2. Teori Peacock dan Wiseman  
Peacock dan Wiseman adalah dua orang yang mengemukakan teori mengenai perkembangan pengeluaran pemerintah yang terbaik. Teori mereka didasarkan pada suatu pandangan bahwa pemerintah senantiasa berusaha untuk memperbesar pengeluaran sedangkan masyarakat tidak suka membayar pajak yang semakin besar untuk membiayai pengeluaran pemerintah yang semakin besar tersebut. Perkembangan ekonomi menyebabkan pemungutan pajak yang semakin meningkat walaupun tarif pajak tidak berubah, dan meningkatnya penerimaan pajak menyebabkan pengeluaran pemerintah juga meningkat. Oleh karena itu, dalam keadaan normal meningkatnya GNP

menyebabkan penerimaan pemerintah yang semakin besar, begitu juga dengan pengeluaran pemerintah menjadi semakin besar.

3. Hukum Wagner mengenai perkembangan aktivitas pemerintah Wagner mengemukakan suatu teori mengenai perkembangan pengeluaran pemerintah yang semakin besar dalam presentase terhadap GNP yang juga didasarkan pula pengamatan pada negara-negara Eropa, US dan Jepang pada abad ke 19. Wagner mengemukakan pendapatnya tersebut dalam bentuk suatu hukum, akan tetapi dalam pandangannya tersebut tidak dijelaskan apa yang dimaksud dengan pertumbuhan pengeluaran pemerintah dan GNP, apakah pengertian pertumbuhan secara relatif atau secara absolut. Apabila yang dimaksud wagner adalah perkembangan pengeluaran pemerintah secara relatif sebagaimana teori musgrave, maka hukum wagner adalah sebagai berikut: dalam suatu perekonomian, apabila pendapatan per kapita meningkat, secara relatif pengeluaran pemerintah akan meningkat.

Dasar dari hukum tersebut adalah pengamatan empiris dari negara-negara maju USA, Jerman, Jepang), tetapi hukum tersebut memberi dasar akan timbulnya kegagalan pasar dan eksternalitas. Wagner menyadari bahwa dengan bertumbuhnya perekonomian hubungan antara industri dengan industri, hubungan industri dengan masyarakat dan sebagainya menjadi semakin rumit atau kompleks. Dalam hal ini wagner menerangkan mengapa peranan pemerintah menjadi semakin besar, yang terutama disebabkan karena pemerintah harus mengatur hubungan yang timbul dalam masyarakat, hukum pendidikan, rekreasi, kebudayaan dan sebagainya.

### **Teori Keynes**

Teori yang membahas mengenai hubungan pengeluaran pemerintah dengan pertumbuhan ekonomi diuraikan panjang lebar dalam *The General Theory Keynes*. Teori ini menguraikan bahwa pendapatan total pereko- nomian dalam jangka

pendek, sangat ditentukan oleh keinginan rumah tangga, perusahaan dan pemerintah untuk membelan- jakan pendapatannya. Paham Keynesian menyatakan bahwa pertumbuhan pendapatan nasional ditentukan oleh besarnya pengeluaran konsumsi, pengeluaran pemerintah, investasi dan net ekspor. Menurut Keynes untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang diukur pada peningkatan pendapatan nasional, diperlukan peningkatan permintaan konsumsi, permintaan pengeluaran pemerintah, permintaan investasi, serta permintaan ekspor dan impor.

Aliran Keynesian menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah memacu pertumbuhan ekonomi. Pandangan Keynesian menjelaskan bahwa pengeluaran pemerintah yang meningkat akan mendorong peningkatan permintaan agregat yang diikuti peningkatan produksi barang dan jasa yang pada akhirnya meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Sehingga pengeluaran pemerintah dipandang sebagai kekuatan eksogenus yang mengubah output agregat. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa dalam kasus ini pertumbuhan ekonomi sebagai fungsi dari pengeluaran pemerintah.

Uraian mengenai keseimbangan mengikut pendekatan penawaran agregat-pengeluaran agregat menunjukkan bahwa keseimbangan dicapai apabila:  $Y = C + I + G + X - M$  (Sadono Sukirno, 2013: 211). Persamaan diatas dikenal sebagai persamaan identitas pendapatan nasional, dimana Y adalah pendapatan nasional sekaligus sebagai penawaran agregat, G menyatakan pengeluaran pemerintah, I menyatakan investasi, X-M adalah net ekspor. Dengan membandingkan nilai G terhadap Y serta mengamatinya dari waktu ke waktu dapat diketahui seberapa besar kontribusi pengeluaran pemerintah dalam pembentukan pendapatan nasional.

### **Jenis – Jenis Kebijakan Fiskal**

Pada dasarnya jenis kebijakan fiskal terbagi menjadi dua yaitu: (Ani Sri Rahayu, 2010: 6-7)

1. Kebijakan fiskal ekspansif (*expansionary fiscal policy*)

Kebijakan ini menaikkan belanja negara dan menurunkan pajak netto. Kebijakan ini menaikkan daya beli masyarakat. Kebijakan fiskal ekspansif dilakukan pada saat perekonomian mengalami resesi/depresi dan pengangguran yang tinggi.

2. Kebijakan fiskal kontraktif  
Kebijakan dengan menurunkan belanja negara dan menaikkan tingkat pajak. Kebijakan ini bertujuan untuk menurunkan daya beli masyarakat dan mengatasi inflasi.

Secara teoritis dikenal empat jenis kebijakan fiskal: (Ani Sri Rahayu, 2010: 7-9)

1. Pembiayaan Fungsional (*The Fuctional Finance*)

Pembiayaan pengeluaran pemerintah ditentukan sedemikian rupa sehingga tidak berpengaruh langsung terhadap pendapatan nasional. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan kesempatan kerja penuh. Berdasarkan konsep pembiayaan fungsional pengeluaran pemerintah, pajak, dan pinjam dipertimbangkan secara terpisah.

Ada beberapa hal penting yang biasanya dilakukan oleh pemerintah yang menganut pola pembiayaan fungsional ini

- a. Pajak bukan hanya difungsikan sebagai alat menggali sumber penerimaan mengatur, tetapi juga digunakan sebagai alat untuk mengatur pengeluaran sektor swasta
- b. Apabila terjadi inflasi yang berlebihan, biasanya untuk mendanai penarikan dana masyarakat, maka pemerintah melakukan pinjaman luar negeri.
- c. Apabila pencapaian target pajak dan pinjaman dalam negeri dalam bentuk pencetakan uang.

2. Pendekatan Anggaran Terkendali (*The Managed Budget Approach*)

Dalam konsep anggaran berdasarkan pendekatan pengelolaan anggaran terkendali, pengeluaran pemerintah, penarikan pajak dan pinjaman

ditujukan untuk mencapai kestabilan ekonomi. Menurut Alvin Hansen dalam tata hukum perpajakan, penerimaan dan pengeluaran pemerintah dari perpajakan dan peminjaman adalah paket yang tidak dapat dipisahkan dalam rangka menciptakan kestabilan ekonomi.

3. Stabilitas Anggaran (*The Stabilizing Budget*)

Konsep stabilitas anggaran disebut stabilisasi anggaran otomatis karena menekankan pada mekanisme otomatis dalam politik fiskal. Penyesuaian penerimaan dan pengeluaran pemerintah secara otomatis terjadi dengan sendirinya dan langsung menstabilkan perekonomian sedemikian rupa tanpa harus ikut campur tangan pemerintah secara langsung yang secara sengaja atau direncanakan.

Dalam stabilisasi anggaran ini, pengeluaran pemerintah lebih ditekankan pada azas manfaat dan biaya relatif dari berbagai paket program. Pajak ditetapkan sedemikian rupa sehingga terdapat anggaran belanja surplus dalam kesempatan kerja penuh.

Dengan kata lain, berdasarkan stabilisasi perekonomian yang otomatis, pengeluaran pemerintah ditentukan berdasarkan perkiraan manfaat dan biaya relatif dari berbagai macam program. Sedangkan pengenaan pajak ditentukan untuk menimbulkan surplus pada periode kesempatan kerja penuh.

4. Pendekatan Anggaran Belanja Berimbang (*Balanced Budget Approach*)

Cara yang diberikan dalam hal ini adalah anggaran yang disesuaikan dengan keadaan (*managed budget*). Tujuannya adalah tercapainya anggaran berimbang dalam jangka panjang. Dengan kata lain, konsep anggaran berdasarkan pendekatan anggaran belanja berimbang menekankan kepada keharusan keseimbangan antara penerimaan dan pengeluaran.



Pendekatan ini selalu mempertahankan anggaran belanja yang seimbang. Berdasarkan konsep anggaran yang berimbang, pada masa depresi, pengeluaran pemerintah akan ditingkatkan. Disisi lain, penerimaan dari sektor perpajakan ditingkatkan yang diikuti dengan upaya untuk tidak menimbulkan deflasi yang berkelanjutan. Sebaliknya, dalam masa inflasi, sektor perpajakan akan dimanfaatkan secara terarah untuk mencegah timbulnya dampak inflasi yang tidak diharapkan.

### Penelitian Terdahulu

Studi empiris mengenai kaitan antara pertumbuhan ekonomi dan pengeluaran pemerintah mendapatkan hasil yang beragam. Disatu pihak penelitian yang dihasilkan mendukung teori Keynes, antara lain: Loizides dan Vamvoukas (2005) bertujuan untuk mengetahui hubungan antara pengeluaran pemerintah (rasio pengeluaran pemerintah terhadap PDB dengan pertumbuhan ekonomi (PDB) di negara – negara Yunani, Inggris dan Irlandia selama tahun 1948 sampai dengan 1995. Metode analisis yang digunakan adalah *Granger Causality* untuk estimasi jangka pendek dan jangka panjang.

Hasil penelitiannya memberikan kesimpulan bahwa pengeluaran pemerintah menyebabkan pertumbuhan disemua negara untuk jangka pendek dan jangka panjang terjadi di negara Inggris dan Irlandia. Selain itu penelitian ini menunjukkan hasil bahwa pertumbuhan ekonomi dapat menyebabkan kenaikan dalam pengeluaran pemerintah dinegara Yunani dan apabila dimasukkan variabel inflasi sebagai variabel penjelas, maka hubungan tersebut terjadi di Negara Inggris. Dari uji kausalitas bivariat antara pertumbuhan ekonomi dan pengeluaran pemerintah ditemukan hasil bahwa di Yunani berlaku hukum Wagner dimana pertumbuhan ekonomi mempengaruhi pengeluaran pemerintah, sementara di Irlandia dan Inggris Raya berlaku teori Keynes. Sementara untuk Yunani dan

Irlandia berlaku kausalitas searah yaitu pertumbuhan ekonomi mempengaruhi pengeluaran pemerintah.

Penelitian yang dilakukan oleh Manik dan Hidayat memberikan hasil dari Uji *Granger Causality* tidak ditemukan hubungan timbal balik (kausal) antara pengeluaran pemerintah dan pertumbuhan di Sumatera Utara tetapi memiliki hubungan yang searah yaitu pengeluaran pemerintah mempengaruhi pertumbuhan ekonomi selama periode pengamatan dan juga menunjukkan hubungan keseimbangan jangka panjang antara pengeluaran pemerintah dan pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara.

Pihak lain menghasilkan kesimpulan yang mendukung Hukum Wagner, misal: Sukartini dan Saleh penelitian ini menyimpulkan bahwa *Wagner Law* berlaku secara parsial di tingkat pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. Adanya keterbatasan dalam series data menyebabkan pengujian kausalitas yang sempurna tidak dapat dipenuhi. Studi ini menyimpulkan untuk kasus pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan, hukum Wagner berlaku seperti yang diprediksikan; bahwa peningkatan pengeluaran pemerintah merespon dalam peningkatan pendapatan per kapita masyarakat. Penelitian Attari dan Javed di Pakistan, menggunakan variabel pertumbuhan ekonomi, pengeluaran pemerintah dan inflasi dengan metode ARDL pada periode tahun 1980-2010, menemukan hubungan jangka panjang antara inflasi, pertumbuhan ekonomi dan pengeluaran pemerintah. Pada jangka pendek pengeluaran pemerintah mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, sedangkan inflasi tidak. Penelitian ini juga menemukan hubungan kausalitas searah antara tingkat inflasi dan pertumbuhan ekonomi, dimana inflasi menyebabkan pertumbuhan ekonomi, serta pengeluaran pemerintah dengan pertumbuhan ekonomi, dimana pertumbuhan ekonomi menyebabkan meningkatnya pengeluaran pemerintah (*Wagner Law*).

Sesuai dengan analisis kausalitas yang memungkinkan terjadinya kausalitas dua arah, sebagian peneliti mendapati berlakunya teori Keynes dan Hukum Wagner bersama-sama, seperti: Samudram *et al.*, (2009) meneliti hubungan antara pengeluaran pemerintah dan pertumbuhan ekonomi di Malaysia dengan menggunakan data tahunan periode 1970-2004. Analisis yang dilakukan meliputi pengujian stasioneritas menggunakan Philip-Peron *unit root test* (PP-test), Gregory-Hansen *structural break test* dan dilanjutkan analisis dengan metode *Autoregressive Distributed Lag* (ARDL). Ditemukan hubungan jangka panjang antara total belanja pemerintah dan GNP. Menggunakan *Structural break* di tahun 2008, karena krisis ekonomi yang melanda Asia (termasuk Malaysia), terdapat kausalitas dua arah antara GNP dan belanja pemerintah sektor administrasi dan kesehatan yang berarti mendukung hukum Wagner maupun teori Keynes. Kausalitas searah terjadi dari GNP ke belanja pemerintah sektor pendidikan, pertahanan, pertanian dan pembangunan sebagaimana hukum Wagner. Sementara peneliti lain tidak menemukan adanya hubungan kausalitas antara pertumbuhan ekonomi dan pengeluaran pemerintah seperti penelitian Bagdigen dan Cetintas (2004) dan Anasmen (2009).

## METODOLOGI PENELITIAN

### Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini mengkaji tentang hubungan jangka panjang (kointegrasi) dan hubungan timbal balik (kausal) antara pertumbuhan ekonomi dan pengeluaran pemerintah di Provinsi Riau dengan menggunakan metode *Cointegration test* dan *Granger Causality test* untuk kurun waktu 1983 -2014.

### Jenis Penelitian dan Sumber Data

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Dalam penelitian kuantitatif, proses analisis memiliki maksud umum meringkas dan menghubungkan data. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dalam bentuk *time series*

yang bersifat kuantitatif, yaitu berupa data tahunan dalam bentuk angka dalam kurun waktu 1983-2014 (31 tahun). Sumber data diperoleh dari Badan Pusat Statistik Provinsi Riau dan Kantor Gubernur Provinsi Riau. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan melakukan pencatatan langsung berupa data seri waktu (*time series*) yaitu dari tahun 1983 hingga 2014 yang diperoleh Badan Pusat Statistik Provinsi Riau dan Kantor Gubernur Provinsi Riau

### Metode Analisis Data

Metode penelitian yang dilakukan adalah analisis deskriptif kuantitatif dan studi literatur dengan menggunakan data sekunder, jurnal, artikel, makalah, dan hasil-hasil penelitian yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu *Cointegrasi test* dan *Granger Causality test* dengan menggunakan *software Eviews 9*. Analisis kointegrasi bertujuan untuk melihat hubungan jangka panjang antara pertumbuhan ekonomi dengan pengeluaran pemerintah. Sedangkan analisis *Granger Causality test* bertujuan untuk melihat hubungan timbal balik (kausal) antara pertumbuhan ekonomi dan pengeluaran pemerintah. Sebelum dilakukan analisis *Cointegrasi test* dan *Granger Causality* maka diperlukan langkah – langkah sebagai berikut:

#### 1. Uji Akar Unit (Unit Root Test)

Stasioneritas merupakan salah satu prasyarat penting dalam model ekonometrika untuk data runtut waktu (*time series*). Data stasioner adalah data yang menunjukkan mean, varians dan autovarians (pada variasi lag) tetap sama pada waktu kapan saja data itu dibentuk atau dipakai, artinya dengan data yang stasioner model *time series* dapat dikatakan lebih stabil. Apabila data yang digunakan dalam model ada yang tidak stasioner, maka data tersebut dipertimbangkan kembali validitas dan kestabilannya, karena hasil regresi yang berasal dari data yang tidak stasioner akan menyebabkan regresi palsu (*spurious*



*regression*). Regresi Palsu adalah suatu fenomena di mana suatu persamaan regresi yang diestimasi memiliki signifikansi yang cukup baik, namun demikian secara esensi tidak memiliki arti. (Shochrul R. Ajija dkk, 2011 : 137)

Salah satu konsep formal yang dipakai untuk mengetahui stasioneritas data adalah melalui uji akar unit (*unit root test*). Uji ini merupakan pengujian yang populer, dikembangkan oleh David Dickey dan Wayne Fuller dengan sebutan *Augmented Dickey-Fuller (ADF) Test*. Jika suatu data *time series* tidak stasioner pada orde nol,  $I(0)$ , maka stasioneritas data tersebut bisa dicari melalui order berikutnya sehingga diperoleh tingkat stasioneritas pada order ke- $n$  (*first difference* atau  $I(1)$ , atau *second difference* atau  $I(2)$ , dan seterusnya. Beberapa model yang dapat dipilih untuk melakukan Uji ADF: (Nachrowi dan Hardius Usman, 2006: 355)

$$\Delta y_t = \delta Y_{t-1} + u_t \text{ (tanpa } intercept)$$

$$\Delta y_t = \beta + \delta Y_{t-1} + u_t \text{ (dengan } intercept)$$

$$\Delta y_t = \beta_1 + \beta_2 t + \delta Y_{t-1} + u_t \text{ (intercept dengan } trend \text{ waktu)}$$

$\Delta$  = *first difference* dari variabel yang digunakan

$t$  = variabel *trend*

Hipotesis untuk pengujian ini adalah :  
 $H_0 : \delta = 0$  (terdapat *unit root*, tidak stasioner)

$H_1 : \delta \neq 0$  (tidak terdapat *unit root*, stasioner)

## 2. *Cointegration Test*

*Cointegration test* ditujukan untuk mengetahui hubungan keseimbangan dalam jangka panjang antara pengeluaran pemerintah dan pertumbuhan ekonomi dengan menggunakan metode *Johansen test*. Metode ini mensyaratkan untuk melakukan dua uji statistik yaitu, dengan Uji *Trace (Trace test,  $\lambda trace$ )* yaitu menguji Hipotesis nol yang mensyaratkan jumlah dari arah kointegrasi adalah  $< p$ . Untuk dapat melihat hubungan kointegrasi tersebut dilihat dari rasio besarnya nilai *Trace* statistik dan *Max-Eigen* statistik dengan nilai *critical value* pada  $\alpha = 5\%$ .

## 3. *Granger Causality Test*

Tujuan Kausalitas Granger adalah meneliti apakah A mendahului B, ataukah B mendahului A, ataukah hubungan A dan B timbal balik. Teknik ini merupakan petunjuk yang berguna mengenai adanya kausalitas dan arah kausalitas. Uji kausalitas Granger jauh lebih bermakna dibanding uji yang berdasarkan korelasi biasa. (Mudrajat Kuncoro, 2011: 83)

## Kerangka Penelitian



## Hipotesis Penelitian

H1: Diduga terdapat kointegrasi (hubungan jangka panjang) antara pertumbuhan ekonomi dan pengeluaran pemerintah di Provinsi Riau Periode 1983 – 2014

H2: Diduga terdapat kausalitas antara pertumbuhan ekonomi dan pengeluaran pemerintah di Provinsi Riau Periode 1983 – 2014

## ANALISI DAN PEMBAHASAN Hasil Estimasi

## Pengujian Akar-akar Unit (*Unit Root Test*)

Dalam analisis *time series*, informasi tentang stasioneritas suatu data *series* merupakan hal yang sangat penting karena mengikutsertakan variabel yang nonstasioner ke dalam persamaan estimasi koefisien regresi akan mengakibatkan *standard error* yang dihasilkan jadi bias. Adanya bias ini akan menyebabkan kriteria konvensional yang biasa digunakan untuk menjustifikasi kausalitas antara dua variabel menjadi tidak valid. Artinya, estimasi regresi dengan menggunakan suatu variabel yang memiliki *unit root* (data nonstasioner) dapat menghasilkan kesimpulan (*forecasting*) yang tidak benar karena koefisien regresi penaksir tidak efisien.

Pada penelitian ini, uji stasioneritas dilakukan dengan menggunakan metode *Augmented Dickey-Fuller Test* (ADF). Uji stasioneritas ini didasarkan atas hipotesis nol variabel stokastik memiliki *unit root*. Dengan menggunakan model uji ADF test, hipotesis nol dan dasar pengambilan keputusan lainnya yang digunakan dalam uji ini. didasarkan pada nilai kritis

MacKinnon sebagai pengganti uji-t. Selanjutnya nisbah *t* tersebut dibandingkan dengan nilai kritis statistik pada *t* tabel ADF untuk mengetahui ada atau tidaknya akar-akar unit. Jika hipotesa diterima berarti variabel tersebut tidak stasioner, maka perlu dilakukan uji derajat integrasi. Uji derajat integrasi dimaksudkan untuk melihat pada derajat atau order diferensi ke berapa data yang diamati akan stasioner.

Dengan mencakup *trend* dan *intercept*, diperoleh hasil perhitungan bahwa untuk variabel pengeluaran tidak langsung pada data *level* secara signifikan tidak mengandung *unit root*, yang berarti bahwa pada data *level* variabel pengeluaran tidak langsung Provinsi Riau sudah stasioner. Sehingga tidak perlu dilakukan pengujian pada tingkat *first difference*. Untuk jelasnya hasil pengujian *unit root* variabel yang dianalisis berdasarkan metode *Augmented Dickey-Fuller Test* (ADF-Test) dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1.2 Hasil Uji Unit Root Pengeluaran Tidak Langsung Pada Level

	t-Statistic	Prob.*
Augmented Dickey-Fuller test statistic	-4.386838	0.0081
Test critical values:		
1% level	-4.296729	
5% level	-3.568379	
10% level	-3.218382	

Pada tabel diatas terlihat bahwa variabel Pengeluaran pemerintah di Provinsi Riau stasioner pada data *level* dengan tingkat signifikansi 1% dan 5%. Hal tersebut dilihat dari nilai probabilitas

sebesar 0.0081 dan nilai ADF statistik sebesar 4,386838 lebih besar dari test *critical value* sebesar 4.296729 signifikan 1% dan 5%

Tabel 1.3 Hasil Uji Unit Root Pengeluaran Langsung Pada Level

	t-Statistic	Prob.*
Augmented Dickey-Fuller test statistic	-3.662184	0.0406
Test critical values:		
1% level	-4.284580	

5% level	-3.562882
10% level	-3.215267

\*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

Pada tabel diatas terlihat bahwa variabel Pengeluaran pemerintah yaitu pengeluaran tidak langsung pemerintah Provinsi Riau stationer pada level dengan tingkat signifikansi 5%. Hal tersebut

dikuti dari nilai probabilitas sebesar 0.0406 dan nilai ADF statistik sebesar 3.662184 lebih besar dari test *critical value* sebesar 3.562882 signifikan 5%.

Tabel 1.4 Hasil Uji Unit Root Pertumbuhan Ekonomi

	t-Statistic	Prob.*
Augmented Dickey-Fuller test statistic	-5.826070	0.0002
Test critical values:		
1% level	-4.284580	
5% level	-3.562882	
10% level	-3.215267	

\*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

Pada tabel diatas terlihat bahwa variabel Pertumbuhan ekonomi stationer pada level dengan tingkat signifikansi 1%. Hal tersebut diikuti dari nilai probabilitas sebesar 0.0002 dan nilai ADF statistik sebesar 5.826070 lebih besar dari *test critical value* sebesar 4.284580 pada signifikan 1%. Sehingga dapat disimpulkan variabel pengeluaran pemerintah dan pertumbuhan ekonomi dalam penelitian ini sudah stationer pada data level dengan tingkat signifikan sebesar 1% dan 5 %.

Diteliti sehingga hasil estimasi dari penelitian ini dapat digunakan untuk melihat hubungan keseimbangan jangka panjang dari kedua variabel yang diteliti. Dalam penelitian ini, uji kointegrasi dilakukan dengan menggunakan metode *Johansen's Cointegration Test*.

*Johansen cointegration* ini berdasarkan pada kerangka VAR dengan memasukkan error-correction untuk membuktikan keberadaan kointegrasi yang biasa disebut dengan *Vector Error Correction*. Dari lima macam kemungkinan spesifikasi pada pengujian hubungan kointegrasi, maka asumsi deterministic yang digunakan dapat dilihat dari tabel di bawah ini:

**Hasil Uji Kointegrasi**

Uji Kointegrasi ditujukan untuk melihat hubungan jangka panjang dari variabel-variabel yang

Tabel 1.5 : Penentuan pada tes asumsi kointegrasi

	None	Data Trend:	None	Linear	Linear	Quadratic
	No Intercept No Trend	Rank or No. of CEs	Intercept No Trend	Intercept No Trend	Intercept Trend	Intercept Trend
Akaike Information Criteria by Rank (rows) and Model (columns)						
	-0.290947	0	-0.290947	-0.124859	-0.124859	0.014362
	-0.484461	1	-0.435249	-0.318537	-0.508475	-0.437343
	-0.415730	2	-0.378584	-0.325375	-0.622786*	-0.619903
	-0.013559	3	-0.227920	-0.227920	-0.543031	-0.543031

Dari hasil tersebut berdasarkan kriteria AIC maka spesifikasi deterministiknya adalah *linear intercept and trend* dalam

pengujian kointegrasi. Dibawah ini akan ditunjukkan tabel hasil kointegrasi:

Tabel 1.6 Hasil Uji Kointegrasi dengan metode *Johansen's Cointegration Test (trace statistic)*

Unrestricted Cointegration Rank Test (Maximum Eigenvalue)

Hypothesized No. of CE(s)	Eigenvalue	Max-Eigen Statistic	0.05 Critical Value	Prob.**
None *	0.841589	55.27686	24.25202	0.0000
At most 1 *	0.570299	25.33995	17.14769	0.0026
At most 2 *	0.340872	12.50513	3.841466	0.0004

Max-eigenvalue test indicates 3 cointegrating eqn(s) at the 0.05 level

\* denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level

\*\*MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values

Hasil dari uji kointegrasi terlihat dari *trace test* dan *max-eigen* yang mengindikasikan adanya kointegrasi pada model yang diuji. Nilai *trace statistic* atupun *max-eigen* lebih besar dari critical value pada tingkat keyakinan  $\alpha = 1\%$ . Pada tabel uji kointegrasi di atas dapat diinterpretasikan adanya 3 kointegrasi baik pada trace test maupun max-eigen pada tingkat keyakinan 1%. Dengan adanya kointegrasi pada uji Johansen memperlihatkan indikasi awal hubungan jangka panjang antar variabel (*cointegrated*) sehingga antar variabel tersebut membentuk suatu hubungan yang linier.

Hasil tersebut menunjukkan bahwa variabel pengeluaran pemerintah meliputi pengeluaran langsung dan pengeluaran tidak langsung dengan pertumbuhan ekonomi yang digunakan dalam penelitian ini memiliki hubungan jangka panjang. Dari hasil uji kointegrasi mengindikasikan bahwa di antara perubahan pengeluaran pemerintah dan pertumbuhan ekonomi memiliki

hubungan stabilitas/keseimbangan dan kesamaan pergerakan dalam jangka panjang. Dengan kalimat lain, dalam setiap periode jangka pendek, seluruh variabel cenderung saling menyesuaikan, untuk mencapai ekuilibrium jangka panjangnya. Berdasarkan hasil uji stasioneritas dan kointegrasi diketahui bahwa pertumbuhan ekonomi dan pengeluaran pemerintah, secara agregat maupun berdasarkan fungsi adalah stasioner dan memiliki hubungan atau keseimbangan jangka panjang sehingga analisis kausalitas yang dilakukan mendapatkan hasil yang dapat dipercaya, bukan nonsense regression (Gujarati dan Porter, 2012: 437).

**Hasil Uji Lag Length**

Sebelum melakukan pengujian dengan metode *Granger Causality*, terlebih dahulu kita melakukan pengujian untuk menentukan panjang lag. Penentuan panjang lag atau *lag length* dilakukan dengan metode *Lag Length Criteria*.

Tabel 1.7 Hasil Uj Lag Length

Lag	LogL	LR	FPE	AIC	SC
0	11.07504	NA	0.000110	-0.598151	-0.454169*
1	15.59478	7.700286	0.000155	-0.266280	0.309648
2	32.19283	24.58971*	9.08e-05*	-0.829098*	0.178775
3	38.35952	7.765463	0.000121	-0.619224	0.820595
4	48.15152	10.15466	0.000132	-0.677890	1.193874
5	57.81957	7.877677	0.000165	-0.727376	1.576334

\* indicates lag order selected by the criterion

Dari hasil pengujian lag length diketahui bahwa tanda bintang (\*) lebih banyak berada pada lag 2. Hal ini menunjukkan bahwa lag optimal yang direkomendasikan oleh Eviews versi 9 adalah lag 2.

Uji kausalitas Granger melihat pengaruh masa lalu terhadap kondisi sekarang sehingga uji ini memang tepat dipergunakan untuk data *time series*. *Granger Causality test* digunakan untuk melihat hubungan kausalitas (timbang balik) antara variabel-variabel yang diteliti yaitu pengeluaran pemerintah Provinsi Riau dan pertumbuhan ekonomi.

**Hasil Uji Kausalitas Granger**

Tabel 1.8 Hasil Uji Kausalitas Granger

Null Hypothesis:	Obs	F-Statistic	Prob.
LPENGELUARAN_LANGSUNG does not Granger Cause LPDRB	30	1.46834	0.2495
LPDRB does not Granger Cause LPENGELUARAN_LANGSUNG		6.49323	0.0054
LPENGELUARAN_TDKLANGSUNG does not Granger Cause LPDRB	30	1.34474	0.2788
LPDRB does not Granger Cause LPENGELUARAN_TDKLANGSUNG		12.1415	0.0002
LPENGELUARAN_TDKLANGSUNG does not Granger Cause LPENGELUARAN_LANGSUNG	30	1.55283	0.2314
LPENGELUARAN_LANGSUNG does not Granger Cause LPENGELUARAN_TDKLANGSUNG		1.16401	0.3286



Berdasarkan hasil pengolahan data di atas menunjukkan hubungan antara pengeluaran pemerintah yaitu pengeluaran langsung dan pertumbuhan ekonomi tidak terdapat hubungan kausalitas (timbal balik) tetapi hanya terdapat hubungan satu arah. Dimana pertumbuhan ekonomi mempengaruhi pengeluaran langsung pemerintah yang ditunjukkan oleh nilai probabilitas sebesar 0,0054 lebih kecil dari 1%. Sedangkan pengeluaran pemerintah tidak memberikan pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi hal ini terlihat dari nilai probabilitas 0,2495 lebih besar dari 5% atau tidak signifikan.

Berdasarkan hasil pengolahan data di atas menunjukkan hubungan antara pengeluaran pemerintah yaitu pengeluaran tidak langsung dan pertumbuhan ekonomi tidak terdapat hubungan kausalitas (timbal balik) tetapi hanya terdapat hubungan satu arah. Dimana pertumbuhan ekonomi mempengaruhi pengeluaran tidak langsung yang ditunjukkan oleh nilai probabilitas sebesar 0,0002 lebih kecil dari 1%. Sedangkan pengeluaran tidak langsung tidak memberikan pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi hal ini terlihat dari nilai probabilitas 0,2778 lebih besar dari 5% atau tidak signifikan.

Dari hasil diatas maka untuk Provinsi Riau tidak berlaku hubungan timbal balik antara pengeluaran pemerintah dan pertumbuhan ekonomi tetapi hanya terjadi hubungan searah yaitu pertumbuhan ekonomi (PDRB) mempengaruhi pengeluaran pemerintah.

### **Intepretasi hasil**

#### **Keterkaitan Pengeluaran Pembangunan dan PDRB**

Dari hasil uji kausalitas Granger terdapat hubungan searah dimana, variabel pengeluaran langsung/ pembangunan pemerintah dipengaruhi pertumbuhan ekonomi, namun tidak sebaliknya. Peningkatan pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari kebutuhan pemerintah dalam penyediaan barang publik juga akan cenderung meningkat, sehingga dibutuhkan pengeluaran pembangunan yang besar. Namun dalam pengeluaran pembangunan membutuhkan proses pembahasan proyek baik itu dari perencanaan maupun pelaksanaan proyek. Oleh karena itu dampak pertumbuhan ekonomi cenderung membutuhkan rentang waktu pada periode selanjutnya. Hal ini sesuai dengan penelitian Alfirman dan Sutriyono (2006) mengenai hubungan pengeluaran pemerintah dengan PDRB di Indonesia pada kurun waktu 1970-2003 yang menggunakan metode VAR ditemukan hasil bahwa PDRB berpengaruh signifikan positif terhadap pengeluaran pembangunan. Hasil penelitian ini sesuai dengan hipotesis yang menyatakan terdapat keterkaitan pengeluaran pembangunan dan PDRB dan memiliki keterkaitan dalam jangka panjang yang signifikan.

#### **B.Keterkaitan Pengeluaran Tidak Langsung Dengan PDRB**

Dari hasil uji kausalitas Granger didapatkan hasil bahwa terjadi

hubungan searah, dimana variabel pertumbuhan ekonomi (PDRB) berpengaruh terhadap pengeluaran tidak langsung. Peningkatan pertumbuhan ekonomi akan mempengaruhi pengeluaran tidak langsung dapat ditunjukkan dengan pemberian subsidi kepada masyarakat tidak mampu dan kompensasi dalam bentuk gaji dan tunjangan, hal ini merupakan peranan pemerintah dalam perekonomian yaitu dalam fungsi distribusi. Setiap peningkatan pertumbuhan ekonomi yang dialami oleh suatu negara, maka pemerintah harus memastikan adanya pemerataan pertumbuhan ekonomi kepada seluruh masyarakatnya. Salah satu kebijakan sebagai implementasi dari fungsi distribusi tersebut adalah kebijakan subsidi merupakan bagian dari belanja rutin pemerintah. Pemberian subsidi ini diharapkan dapat mempersempit ketimpangan kemampuan ekonomi masyarakat. Distribusi pendapatan juga dapat berupa kenaikan belanja pegawai yang juga termasuk bagian belanja rutin pemerintah. Pemberian kenaikan belanja pegawai ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan daya beli aparatur pemerintah.

Dalam jangka panjang, pertumbuhan ekonomi akan meningkatkan pengeluaran tidak langsung/rutin karena dalam jangka panjang pertumbuhan ekonomi akan memerlukan belanja tidak langsung/rutin yang besar juga karena dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi membutuhkan peningkatan barang publik sehingga

akan membutuhkan kebutuhan pelayanan pemerintahan yang juga besar. Kebutuhan pelayanan pemerintahan yang besar akan meningkatkan kebutuhan jumlah aparatur pemerintah dan gaji aparatur, selain itu pembangunan infrastruktur juga membutuhkan belanja pemeliharaan yang termasuk dalam belanja barang.

### **Kesimpulan**

Setelah melakukan analisis dan pembahasan terhadap hasil penelitian sebagaimana diuraikan dalam bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut,

1. Terdapat keterkaitan antara pengeluaran langsung pemerintah dan laju pertumbuhan ekonomi (PDRB) di Provinsi Riau yang signifikan dalam jangka panjang, dimana arah pengaruh berasal dari pertumbuhan ekonomi ke pengeluaran langsung/pembangunan.
2. Keterkaitan antara pengeluaran tidak langsung/rutin pemerintah dan pertumbuhan ekonomi (PDRB) di Provinsi Riau memiliki hubungan searah yaitu pertumbuhan ekonomi mempengaruhi pengeluaran tidak langsung/rutin pemerintah secara signifikan dalam jangka panjang.
3. Hubungan antara pengeluaran pemerintah dengan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Riau sesuai dengan Hukum Wagner yaitu pertumbuhan ekonomi mempengaruhi pengeluaran pemerintah.

### **Saran**

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan sebelumnya, perlu disampaikan beberapa saran yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu,

1. Pemerintah perlu menjaga hubungan keseimbangan jangka panjang antara pengeluaran pemerintah dan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Riau sehingga akan tercipta pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan dapat mempertahankan perumbuhan yang berkesinambungan.
2. Dengan adanya hubungan yang searah yaitu pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap pengeluaran pemerintah maka perlu adanya stimulus kebijakan pada sektor - sektor prioritas sehingga dapat menggerakkan roda perekonomian Provinsi Riau dengan lebih baik lagi.
3. Pemerintah harus melakukan *spending review* secara berkala untuk melihat efisiensi dan

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Bagdigen, M. Dan Cetintas, H. 2004. *Causality between Public Expenditure and Economic Growth: Turkish Case*. Journal of Economic and Social Research. Vol 6
- Doddy, Moch Ariefianto, 2012, *Ekonometrika Essesi dan Aplikasi dengan menggunakan Eviews*, Jakarta, Penerbit Erlangga.
- Gujarati,N Damodar and Dawn C. Porter. 2012. *Dasar-dasar Ekonometrika*. Jakarta: Salemba Empat.

efektivitas pengeluaran pemerintah yang telah dilaksanakan sebagai acuan untuk menetapkan sasaran pembangunan di masa mendatang. Hal ini bertujuan untuk melihat pos-pos pengeluaran yang dilaksanakan oleh pemerintah secara efektif dan efisien.

4. Diperlukan koordinasi yang baik antara pemerintah daerah baik ditingkat provinsi maupun tingkat kabupaten/kota di Provinsi Riau dalam menentukan skala prioritas untuk pengeluaran publik terutama pembangunan infrastruktur. Pemerintah daerah dalam mengalokasikan dana pembangunan lebih efektif dan efisien dengan merumuskan kebijakan – kebijakan yang tepat dalam rangka membangun sarana dan prasaran yang menunjang perekonomian.

- Kuncoro, Mudrajat, 2011, *Metode Kuantitatif Teori dan Aplikasi Untuk Bisnis dan Ekonomi*, Edisi ke-4, Yogyakarta: UPP-STIM YKPN.
- Loizides, Jhon. Dan Vamvoukas, George. 2005. *Government Expenditure and Economic Growth: Evidence from Trivariate Causality Testing*. Journal of Applied Economic. Vol VIII. No. 1. Mei 2005
- Manik, Rikwan E.S. dan Hidayat, Paidi. 2010. *Analisis Kausalitas antara Pengeluaran Pemerintah dan Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Utara (Metode Cointegration Test dan Granger Causality Test)*. Jurnal

- Keuangan dan Bisnis Volume 2. No.1. Maret 2010.
- Mangkoesubroto, Guritno. 2001. *Ekonomi Publik*. Edisi 3, Yogyakarta: BPFU UGM
- Nachrowi dan Hardius Usman. 2006. *Pendekatan Populer dan Praktis Ekonometrika untuk Analisis Ekonomi dan Keuangan*. Jakarta, LPFEUI.
- Rahayu, Ani Sri , 2010, *Pengantar Kebijakan Fiskal*, Bumi Aksara, Jakarta hal 6 – 7
- Sukartini, Ni Made. Dan Saleh, Samsubar. 2012. *Pengujian Hukum Wagner dalam Perekonomian Indonesia Kajian Pengeluaran Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi*. Jurnal Bisnis dan Ekonomi (JBE). Vol. 19. No. 1. Maret 2012
- Sukirno, Sadono, 2013,. *Mikro Ekonomi Teori Pengantar*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Samudram, M. Nair, M. Vaithilingan, S. 2009. *Keynes and Wagner on Government Expenditures and Economic Development: the Case of Developing Economy*. *Empir Econ* (2009)
- Shochrul R. Ajija dkk, 2011, *Cara Cerdas Menguasai Eviews*, Jakarta, Salemba Empat, Jakarta.
- Sri Endang Rahayu, 2011, *Pengaruh pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Sumatera Utara*, Jurnal Manajemen dan Bisnis Vol 11 no 2.
- Alfirman L, Sutriyono E. 2006. Analisis Hubungan Pengeluaran Pemerintah dan Produk Domestik Bruto dengan Menggunakan Pendekatan Granger Causality dan VAR. *Jurnal Ekonomi*